

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 391-399
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8079174>

Pemberdayaan Peran Mahasiswa Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BPPKAD Kabupaten Sumenep Pada Program MKBM Magang Industri

**Uswatun Hasanah¹, Dina Nirmala², Mery Putri Faradina³, Siti Aisyah⁴,
Syafrina Sri Hartatik⁵, Rian Abrori⁶**
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan
Email korespondensi: ^{6*}rian.abrory@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama magang guna memenuhi salah satu persyaratan akademik yang dilaksanakan atas kerjasama Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Kegiatan magang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 9 Juni 2023. Tujuan dilaksanakan pengabdian dalam bentuk magang industri adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman dan juga keterampilan mahasiswa, serta upaya pemberdayaan peran mahasiswa dalam mengimplementasikan kemampuan teoritis dan praktis guna meningkatkan efektivitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Aktivitas yang dilakukan selama magang meliputi rekapitulasi berkas penatausahaan aset, rekapitulasi pakta integritas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), merekap dan menginput data mengenai keterangan mutasi aset, rekapitulasi *contra pos* (CP) OPD, menjurnal dan membuat realisasi anggaran pendapatan per hari/per tanggal OPD, rekapitulasi dan arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengecekan transaksi harian pendapatan daerah, membuat laporan SIDAR (Sistem Informasi Dokumen Arsip) dengan menginput data arsip BPPKAD tahun 2021 dan 2022 yang terdiri dari beberapa OPD.

Kata kunci: *Magang Industri, Pemberdayaan Peran Mahasiswa, Peningkatan Kinerja*

Abstract

This service activity was created as an illustration of the results of the work that was carried out during the internship to fulfill one of the academic requirements carried out in collaboration with the Accounting Study Program at Trunojoyo Madura University and the Regional Revenue, Finance and Asset Management Agency (BPPKAD) of Sumenep Regency. The internship activity is carried out for 4 (four) months starting from 13 February 2023 to 9 June 2023. The purpose of the service in the form of industrial internships is to increase students' knowledge, experience and skills, as well as efforts to empower students' roles in implementing theoretical abilities and practical in order to increase the effectiveness of the performance of the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Sumenep Regency. Activities carried out during the internship include recapitulation of asset administration files, recapitulation of integrity pacts for the utilization of Regional Property (BMD), recording and inputting data regarding information on asset mutations, recapitulation of contra postal (CP) OPD, journalizing and making revenue budget realization per day/per date OPD, recapitulation and archives of Fund Disbursement Orders (SP2D), checking daily regional income transactions, making SIDAR (Archive Document Information System) reports by inputting BPPKAD archival data for 2021 and 2022 which consists of several OPDs.

Keywords: *Industrial Internships, Empowering Student Roles, Increasing Performance*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan dan pelayanan publik secara demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan (Sulaiman, 2014). Tugas dan tanggung jawab tersebut selaras dengan asas desentralisasi dimana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah (Suparmoko, 2002:16). Kewenangan mengelola daerah secara mandiri dan profesional terhadap pemanfaatan seluruh sumber daya termasuk dalam mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku (Mbipi et al., 2020).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Boekorsjom, 2013). Untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa juga dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* (Raharja et al., 2004).

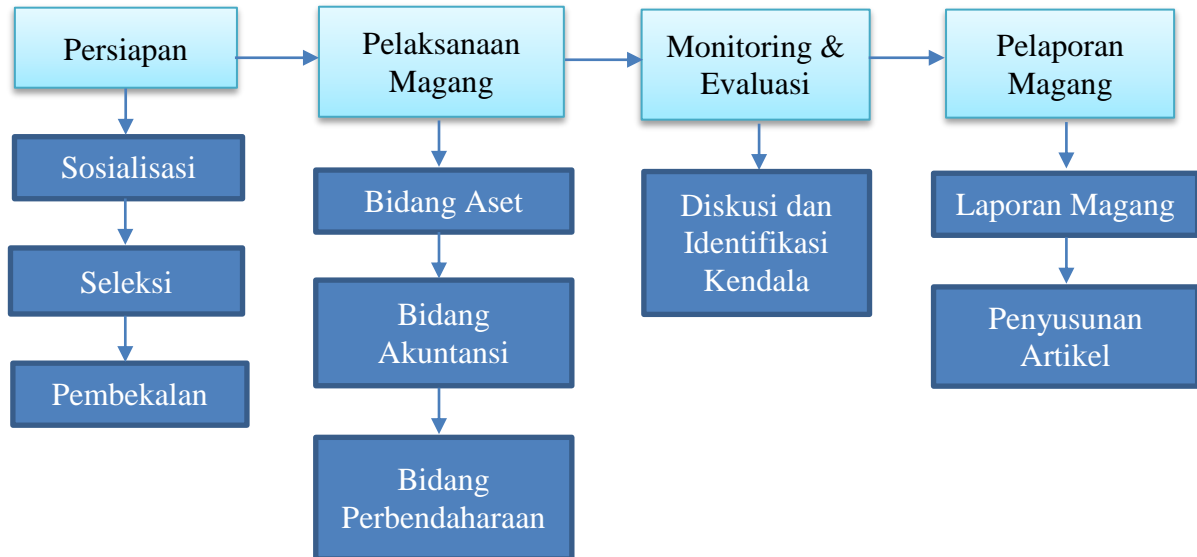
Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* (Boekorsjom, 2013). Karena semakin baik pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah terhadap penatausahaan keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Saiful & Aprilia, 2013). Selain itu, optimalisasi pengelolaan juga dilakukan terhadap aset-aset daerah yang merupakan bagian dari kekayaan daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan entitas akuntansi dan juga entitas pelaporan yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah hingga mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan daerah (Sabili & Sunaningsih, 2020). BPPKAD memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang digunakan dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 105 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, salah satu kedudukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep yaitu membantu Bupati dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan atas aset daerah. Dalam menjalankan kedudukan serta tugas dan fungsi, BPPKAD dibagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang sekretariat, bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, serta bidang aset.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang andal. Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura menyelenggarakan program MBKM dalam bentuk magang industri dengan melibatkan mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas di dunia kerja. Kegiatan magang industri sebagai bentuk sinergitas antara dunia akademisi dan dunia industri, sehingga memberdayakan peran mahasiswa dalam mengimplementasikan kemampuan teoritis dengan dunia praktisi. Dengan program tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (Lie & Susanto, 2023) dan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja (Wasih & Tama, 2023).

METODE

Kegiatan magang industri dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 9 Juni 2023 pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Kegiatan Magang Industri terdiri dari beberapa tahapan, seperti pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 – Tahapan Kegiatan Magang Industri

Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi, seleksi dan pembekalan. Sosialisasi merupakan tahap paling awal yang dilakukan untuk menginformasikan bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan magang industri. Sosialisasi juga dilakukan secara daring. Seleksi dilakukan dengan menjawab soal di *google form* yang sudah disediakan dan wawancara dengan tujuan untuk menentukan lolos ke tahap selanjutnya. Pada tahap pembekalan, diberikan beberapa materi sebagai bekal dalam pelaksanaan magang terkait pedoman magang, *softskill* dan *hardskill* dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai persiapan yang lebih matang untuk melaksanakan kegiatan magang industri.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan magang yang terbagi menjadi 3 bidang penugasan yaitu pada bidang aset, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang perbendaharaan. Adapun aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang industri di bidang aset yaitu rekapitulasi berkas penatausahaan aset, rekapitulasi pakta integritas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan merekap dan menginput data mengenai keterangan mutasi aset. Pada bidang akuntansi dan pelaporan, aktivitas yang dilakukan meliputi rekapitulasi *contra pos* (CP) OPD, menjurnal dan membuat realisasi anggaran pendapatan per hari/per tanggal setiap OPD, dan rekapitulasi dan arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD). Aktivitas yang dilakukan dibidang perbendaharaan yaitu melakukan pengecekan transaksi harian pendapatan daerah dan membuat laporan SIDAR dengan menginput data arsip BPPKAD Kabupaten Sumenep tahun 2021 dan 2022 yang terdiri dari beberapa OPD.

Tahap ketiga yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL). Dosen melakukan kunjungan ke lokasi magang untuk memastikan kegiatan magang berjalan dengan baik dan mahasiswa diberdayakan sesuai kompetensi keilmuan. Melakukan diskusi dengan mitra magang mengenai kendala-kendala yang terjadi selama magang serta mendapatkan masukan mengenai kegiatan

magang yang sedang berjalan. Tahap keempat atau tahap terakhir dalam kegiatan magang industri adalah pelaporan magang. Penyusunan laporan magang sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas magang yang dilakukan. Selain itu, kegiatan magang wajib menghasilkan artikel pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Berkas Penatausahaan Aset

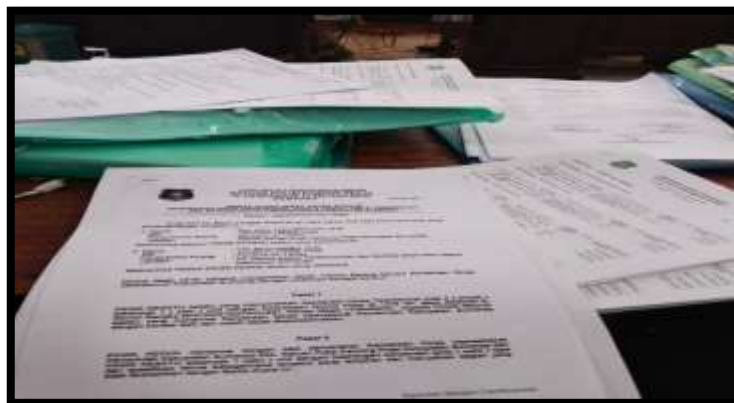
Aktivitas yang diberikan bagi kami di bidang aset yaitu melakukan rekapitulasi atas berkas penatausahaan aset dengan cara menceklis serta mencocokkan berkas pada setiap data aset OPD. Setelah menceklis dan melakukan pencocokan, maka berkas tersebut diletakkan pada map yang sudah disiapkan sesuai dengan nama berkas penatausahaan OPD yang sudah dilakukan. Aktivitas yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 – Rekapitulasi Berkas Penatausahaan Aset

Rekapitulasi Pakta Integritas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)

Aktivitas selanjutnya dibidang aset yaitu kami merekap semua pakta integritas dari setiap OPD yang sudah diserahkan pada bagian bidang aset, setelah itu menghitung aset dari setiap OPD dan menjumlahkannya dengan cara dihitung secara manual, kemudain jumlah tersebut ditulis pada kertas yang sudah disediakan. Pakta integritas pemanfaatan BMD ini bertujuan untuk melaporkan fasilitas barang milik daerah Kabupaten Sumenep kepada pihak bidang aset bahwa aset tersebut dimanfaatkan dengan sebaik dan penuh tanggung jawab, termasuk apabila terjadi kerusakan atau kekurangan. Aktivitas yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3 – Rekapitulasi Pakta Integritas

Merekap dan Menginput Data tentang Keterangan Mutasi Aset

Aktivitas berikutnya yang dilakukan kami dibidang aset adalah menginput data yang telah diberikan oleh staff bidang aset berupa kertas yang berisi tentang keterangan mutasi aset, kemudian diinput menggunakan aplikasi Ms. Excel. Untuk melakukan mutasi aset, terlebih dahulu diharuskan membuat dokumen mutasi aset dengan memasukkan data nominal aset pada setiap OPD. Transaksi perpindahan atau mutasi aset ini bertujuan untuk mendokumentasikan perpindahan aset yang telah terjadi. Aktivitas yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 4 dibawah ini.

NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
2	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
3	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
4	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
5	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
6	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
7	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
8	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
9	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	
10	Per. Barang	Perubahan Aset	Perubahan Aset	

Gambar 4 – Input Data Keterangan Mutasi Aset

Rekapitulasi Contra Pos (CP) OPD

Aktivitas dibidang akuntansi dan pelaporan, kami merekapitulasi Contra Pos (CP) dibuat menggunakan Ms. Excel, kegiatan yang dilakukan dalam rekapitulasi Contra Pos ini adalah (1) berkomunikasi dengan staf yang bertanggung jawab atas rekapitulasi Contra Pos ini, kemudian meminta berkas yang akan diinput ke dalam Ms. Excel, dan juga melakukan bimbingan tentang cara membuat rekapitulasi Contra Pos tersebut dengan staf, (2) memisahkan daftar pengembalian belanja per bulan agar memudahkan penginputan, dan (3) membuat rekapitulasi Contra Pos sesuai dengan format Ms. Excel yang diberikan, yaitu dengan cara memasukkan nama instansi, uraian, tanggal dan nomor STS (Surat Tanda Setoran) ataupun SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) serta jumlah setoran. Aktivitas yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 5 dibawah ini.

No.	NAMA INSTANSI	URAIAN	MEND	MUS	No. STS	JUDUL PROJEK	JUMLAH SETORAN
1	PERANGKAP	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	01.01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	6.00
2	PERANGKAP	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	01.01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	100.000.00
3	PERANGKAP	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	01.01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01	01.01.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan	100.000.00

Gambar 5 – Rekapitulasi Contra Pos

Menjurnal dan Membuat Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi anggaran pendapatan per hari/per tanggal dibuat dengan menjurnal terlebih dahulu seluruh pendapatan per hari/ per tanggal yang diperoleh dari semua OPD, kemudian dimasukkan ke dalam format realisasi anggaran pendapatan per hari/per tanggal setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang sudah disediakan menggunakan Ms. Excel. Tabel realisasi yang sudah dibuat kemudian dirapikan sesuai dengan format yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh staf. Realisasi anggaran pendapatan ini karena dibuat per hari/ per tanggal selama satu bulan. Aktivitas dibidang akuntansi dan pelaporan yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6 – Jurnal Realisasi Anggaran Pendapatan

Rekapitulasi dan Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2022

SP2D diterbitkan sebanyak lima lembar yang salah satunya diberikan kepada bidang akuntansi, kemudian direkap oleh bagian akuntansi dengan cara disortir sesuai dengan OPD dan bulan SP2D diterbitkan. Dalam melakukan rekapitulasi SP2D tersebut dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu (1) sesi penyortiran sesuai bulan dan sesi penyortiran per OPD yang kemudian dikumpulkan dalam satu berkas, dan (2) sesi penyortiran sesuai list OPD yang sudah diberikan. Proses penyortiran ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan penyortiran dilakukan setiap lembar. Aktivitas dibidang akuntansi dan pelaporan yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 7 dibawah ini.

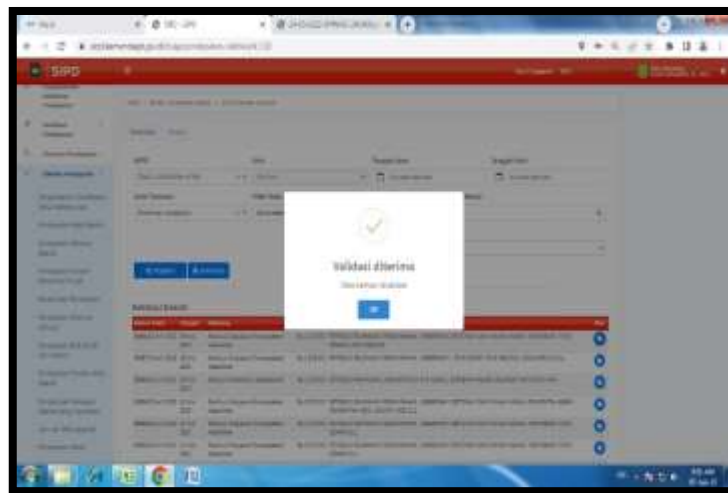


Gambar 7 – Rekapitulasi Arsip SP2D

SP2D yang sudah selesai direkapitulasi, kemudian diarsip dengan cara *checklist* manual mencocokkan SP2D dengan buku besar. Kemudian, dijadikan beberapa tumpuk berkas sesuai daftar dan penjilidan. Tujuan dari penyortiran dan rekapitulasi memudahkan staf keuangan untuk mencari lembar pengajuan asli dengan lebih mudah dan cepat, karena penyimpanannya lebih rapi dan tertata.

Melakukan Pengecekan Transaksi Harian Pendapatan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melakukan aktivitas penagih pajak dan retribusi pada wajib pajak dan retribusi. Tagihan pajak dan retribusi yang sudah ditagihkan kemudian disetor ke kas daerah. Setoran tersebut dicek di rekening kas umum daerah (RKUD) dan dicocokkan dengan berkas yang diterima. Dari berkas tersebut kemudian dicocokkan lagi dengan data aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sudah diinput oleh masing-masing bendahara penerimaan. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Pengecekan transaksi harian pendapatan daerah dilakukan dengan memvalidasi data pada SIPD. Data tersebut dapat digunakan untuk laporan realisasi anggaran oleh OPD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk dilanjutkan sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Aktivitas dibidang perbendaharaan yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 8 dibawah ini.



Gambar 8 – Pengecekan Transaksi Harian

Membuat Laporan SIDAR (Sistem Informasi Dokumen Arsip)

Laporan SIDAR (Sistem Informasi Dokumen Arsip) dibuat sebagai pengarsipan dokumen daerah dan juga dibuat untuk mempermudah pencarian dokumen apabila diperlukan di waktu tertentu. Laporan SIDAR dibuat dengan cara menginput data arsip BPPKAD yang masih aktif dari tahun 2021 dan tahun 2022 yang terdiri dari beberapa OPD. Sebelumnya, data ini dicari dan dipilah apakah masih layak dimasukkan sebagai arsip daerah atau masuk dalam habis masa aktif dokumen. Data SIDAR diambil dari aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) dan kemudian data tersebut di cocokkan dengan dokumen perbendaharaan. Aktivitas dibidang perbendaharaan yang dilakukan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar 9 dibawah ini.

No. Urut	Nama	Jenis	Jumlah	Status	Kategori	Tanggal	Waktu	Lokasi	Catatan
1	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	13 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
2	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	14 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
3	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	15 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
4	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	16 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
5	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	17 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
6	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	18 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
7	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	19 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
8	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	20 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
9	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	21 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan
10	Melaksanakan	Melaksanakan	1	Selesai	Melaksanakan	22 Februari 2023	08.00	BPPKAD	Melaksanakan

Gambar 9 – Membuat Laporan SIDAR

KESIMPULAN

Kegiatan Magang Industri dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan dari tanggal 13 Februari 2023 sampai 9 Juni 2023 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Ada 4 (empat) tahapan yang dilakukan dalam kegiatan Magang Industri ini yaitu tahap persiapan, pelaksanaan magang, monitoring dan evaluasi serta pelaporan magang. Pelaksanaan magang dilakukan pada 3 (tiga) bidang yaitu bidang aset, akuntansi dan pelaporan, dan bidang perbendaharaan. Kegiatan Magang Industri ini tentunya memberikan banyak manfaat untuk banyak pihak, bagi mahasiswa, bagi jurusan dan juga bagi instansi tempat magang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang telah menyelenggarakan kegiatan program MBKM magang industri dan BPKAD Kabupaten Sumenep yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk magang serta semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang sehingga berjalan dengan baik.

Referensi

- Boekorsjom, J. F. (2013). Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada BPKAD Provinsi Papua (Issue 32).
- Lie, M., & Susanto, Y. K. (2023). Digitalisasi Penginputan Data Akuntansi dan Keuangan bagi Sekolah Kak Seto. *Jurnal Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 65–73.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 152–158.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2004). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 111–117.
- Sabili, E. H., & Sunaningsih, S. N. (2020). Peran BPPKAD Dalam Penyajian Data Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2083–2093.

- Saiful, & Aprilia, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Pengelola Keuangan Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(3), 249–260.
- Sulaiman. (2014). Analisis Rasio APBD Kabupaten Pohuwato Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Penelitian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato). *Jurnal Ilmiah*, 11(4), 519–527.
- Wasih, W., & Tama, M. M. L. (2023). Manfaat Mahasiswa Magang Dalam Program MBKM Kerjasama Antar Universitas Bina Darma Palembang Dengan Pemkab Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 536–547.